

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana media massa membangun narasi kebijakan PPN 12% dan bagaimana narasi tersebut membentuk penerimaan masyarakat menengah. Menggunakan kerangka Narrative Policy Framework (NPF) dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis 40 artikel dari CNN Indonesia, Kompas, Tempo, dan Republika (level meso) serta mewawancarai lima informan masyarakat menengah di Kabupaten Kebumen (level mikro). Temuan menunjukkan bahwa keempat media membangun sistem narasi yang berbeda secara fundamental, konfrontatif (CNN Indonesia), deliberatif (Kompas), empatik-struktural (Tempo), dan legitimatif (Republika) dengan distribusi plot yang timpang. Di level mikro, seluruh informan menolak kebijakan, namun dengan lima tipe belief system yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa media berfungsi bukan sebagai pembentuk keyakinan dari nol, melainkan sebagai penguat keyakinan yang sudah terbentuk dari pengalaman ekonomi langsung. Narasi pro-kebijakan gagal diterima karena berbenturan dengan *counter-narrative* berbasis pengalaman yang tidak dapat dibantah oleh data apapun. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur NPF melalui integrasi analisis lintas level dalam konteks kebijakan fiskal di Indonesia.

Kata Kunci: Narrative Policy Framework, framing media, kebijakan PPN 12%, masyarakat menengah

ABSTRACT

The Indonesian government's policy to raise the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% in early 2025 triggered a contestation of narratives in the public sphere. This study analyzes how mass media constructed narratives about the 12% VAT policy and how those narratives shaped middle-class acceptance. Using the Narrative Policy Framework (NPF) with a qualitative approach, this study analyzed 40 articles from CNN Indonesia, Kompas, Tempo, and Republika (meso level) and conducted in-depth interviews with five middle-class informants in Kebumen Regency (micro level). The findings reveal that the four media outlets constructed fundamentally different narrative systems, confrontational (CNN Indonesia), deliberative (Kompas), empathetic-structural (Tempo), and legitimizing (Republika), with uneven plot distribution. At the micro level, all informants rejected the policy, albeit with five different types of belief systems. This study finds that media functioned not as belief-formers from scratch, but as reinforcers of convictions already shaped by direct economic experience. Pro-policy narratives failed to gain acceptance because they clashed with experience-based counter-narratives that no data could override. This study contributes to enriching NPF literature through cross-level analysis integration in the context of fiscal policy in Indonesia.

Keywords: *Narrative Policy Framework, media framing, VAT policy, middle class*